Euforia Pemilu Legislatif, Pilpres Dan Pemilukada Serentak Di Indonesia

Euphoria of the Legislative Election, Presidential Election and Regional Head Election Simultaneously in Indonesia

Orien Effendi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
e-mail: orieneffendi3@gmail.com

Abstrak

Euforia Pemilu Legislatif, Pilpres Dan Pemilukada Serentak di Indonesia. Semenjak runtuhnya masa pemerintahan Orde Baru Tahun 1998 silam, semangat bangsa Indonesia dalam menyambut suasana lahirnya sistem berdemokrasi pertama dengan menyelenggarakan pemilu langsung begitu besar. Melalui pemilu secara langsung kala itu mulailah pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat untuk pertama kalinya. Pemilihan secara langsung oleh rakyat tersebut juga berlaku untuk pemilihan di tingkat daerah yang meliputi pemilihan kepala daerah. Sedangkan dalam perjalanan sejarah untuk pemilu legislatif telah dilaksanakan jauh sebelumnya yang dimulai sejak tahun 1955, sehingga tercatat pemilu legislatif sudah dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali sejak dilaksanakan pertama kalinya sampai dengan pelaksanaannya pada tahun 2019 lalu. Pada perjalanannya, pemilu legislatif, pilpres dan pemilukada memperlihatkan semangat yang tinggi dalam menghadapi beragam tantangan pada setiap periode pemilu. Sehingga bangsa Indonesia terus belajar dari sejarah dan memperbaiki segala kekurangan yang kemudian menghasilkan kematangan dalam berdemokrasi. Dengan pengkajian kepustakaan tulisan ini berusaha mengulas peristiwa yang berkaitan dengan semangat atau euforia pemilu.

Kata Kunci: Reformasi, Demokrasi, Pemilu, Euforia.

Abstrac

Euphoria of the Legislative Election, Presidential Election and Regional Head Election Simultaneously in Indonesia. Since the collapse of the New Order government in 1998, the enthusiasm of the Indonesian people in welcoming the atmosphere of the birth of the first democratic system by holding direct elections has been great. Through direct elections at that time began the election of the president and vice president elected by the people for the first time. The direct election by the people also applies to elections at the regional level which include the election of regional heads. Meanwhile, in the course of history, legislative elections have been held long before starting in 1955, so that it is recorded that legislative elections have been held 12 (twelve) times since they were held for the first time until their implementation in 2019. Along the way, the legislative, presidential and post-conflict local elections showed high enthusiasm in facing various challenges in each election period. So that the Indonesian people continue to learn from history and improve all deficiencies which then produce maturity in democracy. By reviewing the literature, this paper tries to review events related to the spirit or euphoria of the election.

Keywords: Reform, Democracy, Election, Euphoria.

Pendahuluan

Pemilhan umum merupakan suatu sistem pemilihan pejabat publik. Negara yang melaksanakan pemilihan umum adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Sebagaimana disebutkan oleh Titik Triwulan bahwa pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) merupakan sebuah tolak ukur berdemokrasi(Tutik. 2010). Adanya pemilihan umum dan sistem demokrasi yang dijalankan merupakan sebuah jaminan kebebasan bagi warga negara, yang di mana secara tidak langsung merupakan Hak Asasi Manusia (HAM), dalam kaitannya dengan pemilihan umum misalnya, maka jaminan kebebasan yang dimaksud adalah, terpenuhinya hak seluruh rakyat untuk bisa memilih dari hak suara yang dimiliki, dan berhak pula untuk dipilih.

Dengan dijalankan sistem demokrasi di Indonesia maka tentunya harus mengutamakan kepentingan rakyat, seperti halnya dengan berlakunya sistem berdemokrasi yang sudah dijalankan tersebut maka bentuk pemerintahan yang di mana formulasi suatu kebijakan secara tidak langsung ditentukan oleh rakyat melalui hak suara rakyat yang dimiliki (Muhammad Fauzan. 2017). Perlu diketahui bahwa jalan berdemokrasi merupakan berbicara mengenai kepentingan rakyat, atau dapat dikatakan pula bahwa demokrasi merupakan perwujudan mencapai kebaikan bersama. Sehingga pada akhirnya ketika berbicara demokrasi maka berkaitan pula dengan pemilihan umum.

Mengutip pernyataan Thomas Jafferson *“the will of people is the only legitimate foundation of any government”*, bahwa kehendak rakyat merupakan dasar utama yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Menurut Denny J.A semangat dan jiwa politik sebagaimana yang dikemukakan oleh Thomas Jefferson tersebut adalah yang diinginkan pada gerakan reformasi tahun 1998 silam dalam menata ulang sistem pemilu (Denny J.A) Di mana menurutnya, cita-cita yang paling mendasar dari peristiwa reformasi kala itu adalah untuk mengembalikan hak-hak politik masyarakat yang sekian lama dirampas. Semenjak saat itu, perubahan demi perubahan terjadi terutama dalam sistem pemilihan umum baik pemilu pilpres, legislatif, dan pemilukada yang di mana dilakukan secara langsung yang menjadi bagian dari sejarah baru dalam berdemokrasi (Retno. 2009).

Pemilu Legislatif

Pemilu pertama yang diselenggarakan oleh bangsa Indonesia tercatat dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia pada tahun 1955, di mana kala itu Indonesia baru berusia 10 tahun atau setelah merdeka pada tahun 1945. Pada pemilu kala itu bertujuan dalam rangka

pemilihan anggota DPR dan anggota Konstituante (UUDS Tahun 1950). Di mana pada perhelatan pemilu yang dilaksanakan bangsa Indonesia tersebut berlangsung dua kali dalam tahun yang sama, yakni pemilihan anggota DPR yang dilaksanakan tanggal 29 September, sementara untuk pemilihan anggota Konstituante dilaksanakan tanggal 15 Desember Tahun 1955 (Akses 5 April 2021).

Adapun pemilu-pemilu selanjutnya diselenggarakan pada Tahun 1971, 1977, 1982, 1987, dan Tahun 1997 (Mahfud MD.2019). Perlu diketahui bahwa pada perhelatan pemilihan di tahun-tahun tersebut dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto pada masa Orde Baru (Akses 5 April 2021). Sementara setelah runtuhnya masa Orde Baru dengan memasuki masa reformasi pemilu dilaksanakan kembali pada tahun 1999. Di mana pemilu pada tahun 1999 tersebut menjadi perhelatan pemilu pertama setelah masa reformasi. Sementara memasuki pemilu selanjutnya setelah lima tahun pemilu anggota legislatif sebelumnya kemudian diselenggarakan kembali pemilu legislatif pada tahun 2004, di mana kala itu juga bertepatan dengan peristiwa pemilu presiden dan wakil presiden pertama kali.

Pemilu legislatif selanjutnya dilaksanakan pada tahun 2009, 2014, dan 2019, di mana pada pemilu anggota legislatif tahun 2019 tersebut juga tercatat sebagai perhelatan pemilu serentak pertama, baik untuk pemilihan para anggota legislatif, presiden dan wakil presiden, dan kepala daerah. Untuk pemilu pada tahun 2019 kala itu tentu tidak semua daerah atau provinsi yang mengikuti pemilihan serentak di tahun tersebut, melainkan hanya beberapa daerah.

Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden

Sejarah mencatat bahwa untuk pemilihan presiden dan wakil presiden sekurang-kurangnya telah dilaksanakan sebanyak empat kali sejak pemilihannya dilaksanakan melalui pemilu langsung, yakni Tahun 2004, 2009, 2014, dan Tahun 2019 lalu. Di mana rakyat memilih pemimpin secara langsung melalui hak suara yang dimiliki (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003). Jika sebelumnya pada rezim kepemimpinan Orde Baru rakyat tidak pernah diberikan hak untuk memilih pemimpin negara secara langsung. Barulah setelah kekuasaan Presiden Soeharto runtuh yang di mana setelahnya memasuki masa-masa reformasi barulah hak-hak rakyat yang tadinya dirampas sedikit demi sedikit mulai diraih kembali. Entah sebelumnya yang ditandai dengan diberikannya hak-hak kebebasan seperti hak untuk menyampaikan pendapat sampai kepada hak untuk dapat memilih presiden dan wakil presiden secara langsung.

Gegap gempita atau euforia pemilu pilpres yang berlangsung pertama kali pada tahun 2004 kala itu ditandai dengan semangat dan antusiasme para pasangan yang mencalonkan diri untuk mengikuti perhelatan pemilu. Adapun para calon yang tercatat terdaftar pada saat itu sebanyak enam pasangan calon, yakni (1) Megawati Soekarno Putri dan Hasyim Muzadi, (2) Wiranto dan Salahudin Wahid, (3) Amien Rais dan Siswono, (4) Abdurrahman Wahid dan Marwah Daud Ibrahim, (5) Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kala, dan pasangan (6) Hamzah Haz dengan Agum Gumelar (Indira Ardanareswari.2021). Sementara pasangan calon Abdurrahman Wahid Kala itu dikabarkan gugur disebabkan Gusdur kala itu disebut tidak memenuhi syarat kesehatan. Adapun pada pilpres kala itu, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kala dinyatakan sebagai pemenang dalam pemilu pilpres putaran ke II yang bertarung dengan Megawati Soekarno Putri dan Hasyim Muzadi.

Pemilu Kepala Daerah

Berkaitan dengan pengisian jabatan pemimpin kepala daerah sebelum adanya sistem pemilu yang dilaksanakan secara langsung kala itu. di mana sekurang-kurangnya terdapat empat (sitem) pemilihan kepala daerah yang pernah digunakan di Indoensia. Adapun diantaranya adalah (Topan Yuniarto.2021).

Pertama, sistem atau model dengan ditunjuk atau diangkat oleh pemerintah di pusat, di mana dengan cara atau sistem tersebut setidaknya pernah dijalankan ketika Indonesia masih dijajah bangsa Kolonial dan masa jajahan Jepang, dan pasca kemerdekaan. Adapun dasar hukum diberlakukannya sistem atau model pengangkatan kepala daerah tersebut adalah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 1945 dan perundang-undangan lainnya.

Kedua, terdapat sistem pemilihan kepala daerah dengan cara penunjukan berdasarkan penetapan presiden. Atau pada kala itu lebih dikenal dengan masa atau era dikeluarkannya Dekrit Presiden. Adapun landasan hukum pengangkatan kepala daerah pada kala itu dengan sistem atau cara yang kedua tersebut adalah dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah sekaligus dengan pencabutan dan penyempurnaan beberapa perundang-undangan sebelumnya yang menjadi landasan pengangkatan kepala daerah pada sistem atau cara yang pertama, yakni dengan dicabutnya UU No 1 Tahun 1957, dan pencabutan atau penyeempurnaan perundang-undangan lainnya.

Ketiga, cara pemilihan kepala daerah ketiga yang dikenal dengan cara atau sistem pemilihan perwakilan, di mana sistem ini untuk memilih para kepala daerah dilakukan lembaga legislatif DPRD. Barulah setelahnya presiden akan menentukan para calon kepala daerah tersebut yang dipilih untuk menjadi pemimpin di daerah masing-masing. Adapun dasar hukum yang digunakan dalam sistem dan cara pengangkatan atau pemilihan para kepala daerah pada sistem atau cara ketiga tersebut adalah UU No 5 Tahun 1974. (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah).

Keempat, cara pengangkatan atau pemilihan kepala daerah yang keempat adalah dengan cara pemilihan perwakilan yang murni dipilih oleh lembaga atau anggota legislatif DPRD tanpa melalui persetujuan pemerintah pusat atau presiden. Adapun sebagai dasar hukumnya adalah UU No 18 Tahun 1965 dan UU No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Mengenai ketentuan cara pengangkatan kepala daerah tersebut dapat ditemui pada 34 UU No 22 Tahun 1999. (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah)

Berdasarkan pemaparan tata cara atau model pemilihan para kepala daerah yang beberapa cara pernah dijalankan oleh bangsa Indonesia di atas, dapat dipahami bahwa setiap periode atau sistem tata caranya berbeda-beda, misalnya pemilihan kepala daerah yang pertama dengan cara penunjukan oleh pemerintah pusat yang di mana dalam hal ini berlaku sebelum maupun pasca kemerdekaan Indonesia. Kemudian cara yang kedua dengan penetapan oleh presiden, sementara yang ketiga gabungan dari cara yang kedua yakni dengan pemilihan oleh DPRD yang seterusnya meminta persetujuan presiden, kemudian cara yang keempat pernah dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam melakukan pemilihan kepala daerah sebelum diberlakukannya pemilihan umum adalah dengan cara pemilihan sepenuhnya oleh DPRD tanpa campur tangan atau intervensi pemerintah pusat ataupun presiden.

Jika melihat perjalanan sistem tata cara pemilihan kepala daerah sebelum adanya sistem pemilihan langsung oleh rakyat tersebut di atas, tentunya memiliki kelebihan maupun kekurangan, di mana dapat dijelaskan dibawah ini:

Dampak positif penentuan tata cara pemilihan kepala daerah sebelum adanya sistem pemilihan umum dapat dilihat secara kasat mata, misalnya efisiensi waktu dan biaya. Misalnya pemilihan kepala daerah dengan sebelum kemerdekaan atau pasca kemerdekaan

yakni dengan cara pengangkatan oleh pemerintah pusat, tentu tanpa pengkajian dan pencarian data-data yang resmi sekilas bisa disimpulkan bahwa dari segi biaya dan waktu lebih sedikit ketika cara ini digunakan, begitupun dengan sistem tata cara pemilihan kepala daerah dengan cara penetapan oleh presiden, atau penunjukan presiden dan DPRD, dan penunjukan murni oleh DPRD. Di mana semua itu secara kasat mata dampak positifnya adalah mengenai efisiensi waktu dan biaya.

Sedangkan sisi negatifnya secara kasat mata pula dapat dilihat bahwa pelaksanaan dipilihnya para kepala daerah secara langsung maupun tidak langsung oleh rakyat, dapat dilihat bahwa dari segi biaya dan waktu memang berbanding terbalik, di mana dengan tata cara atau sistem pemilihan kepala daerah yang dilakukan sebelumnya dengan cara penunjukan pemerintah pusat, presiden, DPRD dan lainnya terbilang ringan dari segi biaya, sementara untuk pelaksanaan pemilihan langsung butuh anggaran yang besar untuk menyelenggarakan pesta demokrasi tersebut. Namun meski demikian, dampak positifnya dengan cara pemilihan langsung yang tidak kalah penting adalah tersalurnya hak-hak suara rakyat yang bisa memilih secara langsung pemimpin daerahnya, di mana dalam hal ini merupakan kemajuan dalam konteks berdemokrasi. (Hilwan.2021).

Euforia Pemilu Legislatif, Pilpres dan Pilukada Serentak di Indonesia

Pemilihan umum serentak untuk pemilu legislatif, pilpres dan pilukada pertama kali dilaksanakan pada tahun 2019 lalu. Perlu diketahui bahwa sejarah pertama kali pemilu memiliki konteks yang berbeda dengan pembahasan kapan pertama kali pemilu legislatif, pilpres, dan pilukada berlangsung. Sebagaimana sudah dipaparkan di atas bahwa untuk pemilu legislatif sendiri pertama kali dilaksanakan pada tahun 1995 silam, sementara untuk pemilu pilpres pertama diselenggarakan Tahun 2004, demikian halnya untuk pilukada yang pertama kali diselenggarakan pada Tahun 2004.

Perlu diketahui bahwa pemimpin daerah seperti halnya gubernur yang di mana terpilih dengan cara penunjukan atau melalui suara pemilih dari anggota DPRD, maka jabatan kepala daerah tersebut tetap berlaku sampai akhir masa jabatan selama lima tahun kedepan. Sehingga ketika pemilu yang dimulai pada tahun 2004, kepala daerah yang terpilih sebelumnya tetap menjabat. Di mana setelahnya barulah mengikuti pemilihan kepala daerah dengan cara pemilihan langsung. Seperti misalnya di Provinsi Nusa Tenggara barat, pada 2003 berlangsung pemilihan gubernur oleh DPRD untuk masa jabatan atau periode 2003-2008. Maka setahun setelahnya pada tahun 2004 tidak melaksanakan pilukada meski

pemilu sudah mulai dilaksanakan pada tahun tersebut, barulah pemilu pada pertama dilaksanakan pada tahun 2008.

Tujuan Ingin Dicapai Dalam Perhelatan Pemilu Serentak

Semangat atau euforia pelaksanaan perhelatan pemilu serentak yang diselenggarakan untuk pertama kalinya yakni Tahun 2019 lalu memang menyisakan beragam peristiwa yang terjadi sepanjang penyelenggaraan pemilu serentak tersebut. Dengan dilaksanakannya pemilu legislatif, pilpres dan pemilu pada di sebagian daerah atau provinsi yang berlangsung di waktu, hari, dan tahun yang sama memang bisa dikatakan terbilang berhasil dan menjadi sejarah baru keberhasilan perhelatan demokrasi di Indonesia, meski demikian dalam pelaksanaan pemilu serentak kala itu suatu kejadian yang tidak mengenakan yakni banyaknya anggota atau petugas pemilu yang meninggal dunia yang di indikasikan mengalami kelelahan karena disebabkan oleh beban tugas dan tanggungjawab penyelenggara pemilu kala itu yang begitu berat.

Pada dasarnya dengan diselenggarakannya pemilu serentak Tahun 2019 lalu memiliki tujuan baik, seperti misalnya menghemat anggaran dan menyeragamkan waktu pemilu legislatif, pilpres dan pemilu di waktu yang sama agar tidak terlalu sering melakukan pemilihan umum di tahun yang sama namun tanggal dan waktu yang berbeda, seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya. Disamping banyak yang mendukung langkah tersebut namun ada juga sebagian yang tidak mendukung, terlebih manakala setelah pelaksanaannya yang pertama pada tahun 2019 lalu diwarnai dengan insiden atau kejadian yang tidak mengenakan dengan banyaknya anggota atau petugas pemilu yang meninggal akibat kelelahan dengan jam kerja yang lama dan sebagainya.

Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah pelaksanaan pemilu serentak benar bahwa dapat mengurangi atau menghemat biaya dan lain sebagainya. Mengutip sumber berita dari media Kompas yang menyebutkan bahwa ketika materi undang-undang tentang pelaksanaan pemilu serentak di ujikan di Mahkamah Konstitusi adapun beberapa alasan dari Hakim Konstitusi ketika akan mengesahkan perundang-undangan sebagai pedoman pemilu serentak tersebut (Ihsan.2021). Diantaranya adalah Hakim MK menganggap dengan dilaksanakannya pemilu serentak dapat menghemat biaya dan waktu, selain itu disebutkan dalam berita yang dimuat Kompas tersebut yang menyebutkan bahwa Hakim MK juga berpandangan dengan dilaksanakannya pemilu serentak dapat mengurangi konflik atau gesekan horizontal.

Berkaitan dengan hal tersebut, dari sumber data yang ada bahwa total anggaran untuk pemilu serentak tahun 2019 mencapai 25, 59 Triliun, sementara pada perhelatan pemilu pada tahun 2014 anggaran mencapai 15, 1 Triliun. Dengan demikian tujuan dilaksanakannya pemilu serentak dengan harapan untuk menghemat pengeluaran anggaran bisa dikatakan tidak tercapai, karena faktanya anggaran untuk pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 masih lebih mahal jika dibandingkan dengan anggaran yang di gelontorkan pada pemilu 2014. Namun meski demikian seperti yang disebutkan dalam berita atau jurnal resmi Menteri Keuangan bahwa meski terjadi peningkatan anggaran yang dikeluarkan namun diharapkan pemilu serentak dapat menggerakkan perekonomian, di mana disebutkan seperti besarnya biaya kampanye, pembuatan atribut, ongkos iklan dan lain-lain mampu meningkatkan perekonomian (Nufransa.2019).

Lalu bagaimana dengan pendapat Hakim MK yang mengatakan dengan melaksanakan pemilu serentak dapat menekan konflik horizontal, nyatanya pada perhelatan pemilu serentak tahun 2019 lalu, konflik terutama antara kelompok pendukung para calon presiden mewarnai pesta demokrasi tersebut, mulai dari saling serang dengan berita hoax pada saat kampanye, sampai terjadi konflik antara aparat negara dengan salah satu kubu pendukung pasangan calon yang tidak terima pendukungnya kalah, dan masih banyak lagi konflik lainnya yang mewarnai selama gelaran pesta demokrasi tahun 2019 lalu. Dengan demikian anggapan dengan dilaksanakannya pemilu serentak agar mampu menekan konflik horizontal ternyata tidak terwujud.

Pengaruh Euforia Pilpres Terhadap Kualitas Pileg dan Pemilukada Serentak

Sebagaimana dipaparkan di atas bahwa semangat euforia masyarakat yang tinggi menyambut perhelatan pemilu serentak pada tahun 2019 lalu mengisahkan beragam peristiwa yang terjadi sepanjang penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut. Selain beberapa alasan dan tujuan dengan dilaksanakannya pemilu serentak yang sudah dipaparkan sebelumnya di atas yakni harapan agar dapat menghemat anggaran, menekan konflik dan lain sebagainya, yang nyatanya beberapa harapan tersebut tidak terwujud dan tidak berjalan sesuai harapan. Berkenaan dengan itu, maka terdapat hal lain yang memerlukan perhatian khusus demi berlangsungnya perhelatan demokrasi yang berkualitas, semangat atau euforia masyarakat dalam menyambut perhelatan demokrasi tentu harus dibarengi dengan sikap dan cara-cara yang bijaksana dan teladan.

Mengutip hasil survei Caharta Politika di mana memperlihatkan bahwa semangat euforia masyarakat pada pemilu serentak tahun 2019 lalu sebagian besar menyedot perhatiannya pada pemilihan presiden dan wakil presiden, sehingga menurut hasil survei tersebut masyarakat lebih cenderung melupakan pemilihan legislatif dan pemilukada (Imam Budilaksono.2021). Melihat kenyataan itu kualitas para anggota legislatif, kepala daerah yang terpilih dapat dipertanyakan, sebab jika merujuk dari hasil survei yang menunjukkan bahwa masyarakat lebih terfokus pada pemilu pilpres maka bisa saja di lapangan ketika masyarakat memilih anggota legislatif ataupun kepala daerah bisa asal-asalan dalam memilih tanpa mengetahui visi misi yang dibawa oleh para calon pemimpin tersebut.

Tentu penomena ini patut menjadi perhatian kedepannya, sebab pemilukada serentak ini akan terus dilaksanakan selama dasar hukum atau undang-undang yang menjadi pedoman pelaksanaan pemilu serentak tidak di uji kembali di Mahkamah Konstitusi (MK). Terlebih periode pemilu serentak berikutnya pada tahun 2024 mendatang, serentak akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah di 34 provinsi seluruh Indonesia, belum lagi kepala daerah setingkat bupati/wali kota yang bertepatan juga pemilihannya di waktu tersebut, maka bisa di bayangkan, ketika semangat masyarakat yang menggebu-gebu dan nantinya lebih fokus pada pemilu pilpres, maka berapa ratus orang wakil rakyat dan puluhan kepala daerah yang akan dipilih tanpa dicermati visi misi atau cita-cita apa yang di bawa untuk memajukan daerah jika masyarakat masih abai dan hanya terfokuskan pada pemilihan pemimpin negara.

Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang sudah dijelaskan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan yang di antaranya:

Dalam perjalanan sejarah pemilu di Indonesia telah melewati beberapa model atau sistem pemilihan, misalnya pada pemilukada sekurang-kurangnya terdapat empat sitem yang pernah dipakai sebelum pemilihan secara langsung, yakni dengan pengangkatan oleh pemerintah pusat, penunjukan melalui penetapan presiden, pemilihan perwakilan oleh DPRD dengan persetujuan presiden, dan pemilihan oleh DPRD sepenuhnya tanpa intervensi pemerintah pusat maupun presiden. Demikian halnya dengan pemilihan presiden, sebelum dilaksanakan dengan cara pemilihan umum di mana sebelumnya dipilih oleh MPR. Sementara untuk anggota legislatif pada pemilu pertama Tahun 1955 silam telah menggunakan sistem yang dipilih langsung oleh rakyat.

Euforia atau semangat melaksanakan pemilu legislatif, pilpres, dan pilkada serentak memiliki tujuan yang baik disamping hal tersebut merupakan sebuah inovasi dan gagasan dalam kemajuan berdemokrasi. Namun dibalik harapan dilaksanakannya pemilu serentak nyatanya masih belum terwujud sepenuhnya, beberapa tujuan pelaksanaan pemilu serentak yakni untuk menghemat anggaran dan menekan konflik horizontal tidak sesuai harapan. Terlebih lagi terjadi fenomena baru dalam perhelatan pemilu serentak tersebut yang terkesan bahwa masyarakat hanya terfokus pada pemilu pilpres, sehingga pemilu legislatif dan pilkada cenderung diabaikan yang kemudian berdampak pada kualitas pemilu yang dihasilkan.

Daftar Pustaka

- Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta: Thafa Media, 2016.
- Aryojati Ardipandanto, Menta Ulang Desain Pemilu Serentak, Pileg, Pilpres, Dan Pilkada, *Jurnal Pulsit Info Singkat*, Volume 13 Nomor 2 Januari 2021.
- Denny J.A, “Membangun Tradisi Baru Politik Bakti Untuk Indonesia, Enam Ikon Pembawa Tradisi Baru”.
- Ihsanuddin, Pemilu Serentak Efisien, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2014/01/23/1856360/MK.Pemilu.Serentak.Efisien.Pemilih.Jadi.Cerdas>. Akses 6 April 2021.
- Imam Budilaksono, Pileg Cenderung Dilupakan Karena Eufhoria Pilpres, dalam <https://www.antaraneews.com/berita/820100/charta-politika-pileg-cenderun-g-dilupakan-karena-euphoria-pilpres>. Akses 6 April 2021.
- Jaelan Usman, Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pemerintah Daerah Dengan Semangat Eforia Demokrasi Lokal, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 1, Nomor 1 April 2011.
- Jamaludin, Eforia Otonomi Daerah Dalam Bingkai Politik Hukum Pasca Reformasi di Indonesia, *Jurnal Diversi*, Volume 1, Nomor 1 April 2015.
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2007.
- Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press, 2017.
- Nufransa Wira Sakti, Media Keuangan: Pesta Demokrasi Untuk Rakyat, *Jurnal BPPK*, Volume 14 Nomor 139 April 2019.
- Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Peraturan Perundang-Undangan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Peraturan Perundang-Undangan Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Perundang-Undangan Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Perundang-Undangan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Peraturan Perundang-Undangan Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

Peraturan Perundang-Undangan Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

Retno Saraswati, Calon Perseorangan Dalam Suatu Pilkada, *Jurnal Konstitusi*, Volume 2, Nomor 1 Juni 2009.

Sahya Anggara, *Sistem Politik di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.